

Kecebong Versus Kampret; Slogan Negatif Dalam Komunikasi Politik Pada Pemilihan Presiden 2019*

Nur Rohim Yunus,¹ Ida Susilowati,² Zahrotunnimah³

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

²Universitas Darussalam Gontor, ³Universitas Ibn Khaldun Bogor



[10.15408/sjsbs.v6i4.13747](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13747)

Abstract:

As the largest democratic party in any region, presidential elections are often followed by campaigns as a means of political socialization in general elections. Likewise what happened in the 2019 presidential election in Indonesia. Unfortunately, the campaign found some negative propaganda through the slogans of each of the supporters of the two candidate pairs. Ironically, this slogan seems to divide the Indonesian people into two big camps with the name of an animal that is not suitable for humans. The term "Kecebong" for supporters of the Joko Widodo-Ma'ruf Amien camp and the term "Kampret" for supporters of the Prabowo Subianto-Sandiaga Shalohuddin Uno camp. The negative slogan "Kecebong Versus Kampret" was heard massively during the 2019 presidential election process. This study uses qualitative research methods with data collection based on some existing literature and mass media. The results show that this slogan is very familiar to the Indonesian public, especially on several social media such as Facebook, Instagram, Twitter and so on. This is clearly not in accordance with the norms of life of the Indonesian people when viewed from the perspective of Indonesian public ethics based on the Pancasila ideology.

Keywords: Negative Slogan; The 2019 Presidential Election; Political Communication

Abstrak:

Sebagai pesta demokrasi terbesar di setiap Negara, pemilihan umum presiden senantiasa disertai kampanye sebagai bentuk sosialisasi politik dalam pemilihan umum. Begitu juga yang terjadi dalam pemilihan umum presiden 2019 di Indonesia. Sayangnya, dalam kampanye ditemukan beberapa propaganda negatif melalui slogan dari masing-masing pendukung kedua pasangan kandidat. Ironinya, slogan ini seakan membelah rakyat Indonesia menjadi dua kubu besar dengan nama hewan yang tak layak disematkan pada manusia. Sebutan "Kecebong" bagi pendukung kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amien dan sebutan "Kampret" bagi pendukung kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Shalohuddin Uno. Slogan negatif "Kecebong Versus Kampret" begitu massif didengar selama proses pemilihan umum presiden 2019 berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan pada beberapa literatur dan media massa yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa slogan ini sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia, khususnya pada beberapa media sosial seperti facebook, Instagram, twitter dan lain sebagainya. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia jika ditinjau berdasarkan perspektif etika publik bangsa Indonesia yang berlandaskan Ideologi Pancasila.

Kata Kunci: Slogan Negatif; Pilpres 2019; Komunikasi Politik

*Diterima: 13 November 2019, Revisi: 15 Desember 2019, Diterima 17 Desember 2019.

¹ **Nur Rohim Yunus** adalah dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id.

² **Ida Susilowati** adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Email: idasusilowati@unida.gontor.ac.id

³ **Zahrotunnimah** adalah dosen tetap bidang Komunikasi Politik pada FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor. Email: zahrotunnimah@fai.uika-bogor.ac.id

Pendahuluan

Nilai dasar *fairness, liberty, justice, equality, dan brotherhood* dalam sistem demokrasi yang diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik,⁴ menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem pemerintahan yang paling banyak dianut negara-negara dunia saat ini. Setiap Negara yang menerapkan system demokrasi akan senantiasa menghadapi proses demokratisasi⁵, salah satunya pemilihan umum atau seringkali disebut dengan istilah Pesta Demokrasi. Disebut Pesta Demokrasi, karena pada momen ini, seluruh rakyat bebas menyuarakan hak pilihnya dalam menentukan kepemimpinan di negaranya. “*One Man One Vote*” begitulah istilah yang digunakan dalam pesta demokrasi untuk menunjukkan bahwa setiap individu yang sudah mencapai batas cukup usia, memiliki satu hak suara yang seharusnya disuarakan dalam memilih pemimpin bangsa. Namun perlu dipahami, bahwa dalam kompetisi yang demokratis hendaknya tidak keluar dari bingkai etika normatif dan tetap harus menjaga kesantunan dalam berpolitik.⁶ Dalam hal ini, sosialisasi dan pendidikan politik perlu diperhatikan dengan seksama.

Pemilihan Umum Presiden di Indonesia tahun 2019 memiliki keunikan-keunikan tersendiri dibandingkan pemilu-pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dilihat dari berbagai fenomena yang muncul selama proses pemilihan umum presiden kali ini, dimana perseteruan antara kedua pendukung masing-masing kandidat yang begitu antusias dalam mengkampanyekan calon kandidatnya masing-masing. Tidak hanya di jalan-jalan saat masa kampanye berlangsung, namun media sosial pun turut memberikan aura panas dalam perseteruan kedua belah kubu. Beberapa istilah-istilah yang ditujukan kepada masing-masing kubu muncul, mulai dari istilah emak-emak vs ibu Negara, bani taplak vs bani serbet, hingga istilah kampret vs kecebong. Di satu sisi, partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden tahun ini bisa dibilang meningkat drastis, baik di tingkat pemilih pemula hingga komunitas emak-emak yang pada pilpres tahun-tahun sebelumnya kurang antusias dalam berpartisipasi. Namun di sisi lain, partisipasi masyarakat yang tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai juga patut menjadi hal yang perlu diperhatikan bahkan menjadi suatu keprihatinan dalam berdemokrasi.

Demokrasi yang tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang tepat dan sesuai, justru dapat merusak cita-cita bangsa. Hal tersebut dapat melahirkan kemarahan dan kebencian di masyarakat yang tentu saja dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan etika politik, dimana etika politik bangsa dan Negara Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber moralitas utama.⁷ Indonesia melandaskan demokrasi

⁴ Arbi Sanit, “Gagasan Pematangan Sistem Demokrasi Dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Kelembagaan dan Kepemimpinan”, dalam *Jurnal Politik* Vol. 1 No. 1, Agustus 2015, hlm. 158

⁵ Abd Kadir Patra, “Masalah dan Prospek Demokrasi”, dalam *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 1 2009, hlm. 35

⁶ Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia”, dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No.1, 2012, hlm. 2.

⁷ Kaelan, “Pendidikan Pancasila: Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air”, Paradigma: Yogyakarta, Edisi Reformasi: 2016, hlm: 93

yang dianut berdasarkan ideologi Pancasila, yaitu demokrasi yang berketuhanan, demokrasi yang berkemanusiaan, demokrasi yang berpersatuan, demokrasi yang berkerakyatan, dan demokrasi yang berkeadilan. Hal tersebut menjadi panduan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Jika dalam proses demokrasi Pancasila tidak mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut, maka hal tersebut perlu dievaluasi dengan seksama.

Metode Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi munculnya jargon-jargon negatif yang muncul selama proses pemilihan umum 2019 berlangsung, serta dampak yang ditimbulkan dari jargon-jargon negatif yang justru menjadi massif digaungkan dalam masa-masa pemilihan umum presiden 2019 di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sistem penulisan deskriptif analitis, dimana data-data dikumpulkan dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder dari beberapa literature ilmiah dan berbagai media massa yang ada. Tulisan ini menggunakan pendekatan pendidikan politik dalam menganalisa permasalahan yang ada.

Analisis dan Pembahasan

Pilpres 2019 Dan Jargon Politik Dua Kubu

Selama proses pemilihan umum presiden 2019 berlangsung, isu-isu bermunculan dari kedua kubu. Diantaranya adalah isu kebangkitan komunis dan khilafah serta munculnya jargon-jargon yang berkonotasi negatif. Masyarakat lebih disajikan dengan isu-isu yang memicu kebencian dan menimbulkan perpecahan bangsa. Dalam proses sosialisasi politik selama pemilihan umum presiden berlangsung, masyarakat seharusnya disajikan agenda-agenda edukatif yang mengarah pada pendidikan politik. Adu visi misi dan kognitifitas dalam hal kepemimpinan yang akan diimplementasikan para calon kandidat kedepan. Adu visi misi seharusnya yang menjadi makanan masyarakat selama proses pilpres berlangsung. Sayangnya, masyarakat justru dipertontonkan dengan isu-isu sensitif kebangsaan hingga jargon-jargon negatif yang ditujukan kepada kedua kubu pendukung calon presiden dan wakil presiden.

Salah satu fenomena yang muncul dalam pilpres 2019 adalah jargon atau sebutan hewan kepada para pendukung kedua kandidat yang diusung. Istilah "Kecebong" yang ditujukan bagi pendukung kubu petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan istilah "Kampret" yang ditujukan kepada pendukung kubu lawan Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno. Kedua istilah tersebut menjadi terdengar umum selama proses pilpres berlangsung, padahal keduanya seharusnya tidak dijadikan istilah atau sebutan bagi kedua pendukung, karena keduanya merupakan nama-nama hewan yang seharusnya tidak disandangkan untuk manusia.

Artikel *bbc.com* berjudul *Kamus Nyinyir Pilkada Jakarta yang Dipakai di Media Sosial* (12/4/2017) bisa menjadi contoh. Di situ tertulis, ada beberapa istilah yang

digunakan untuk melabeli dan menyerang lawan politiknya. Sebut saja” si mulut jamban”, ”kaum bumi datar”, ”cebonger”, ”bani taplak”, ”bani serbet”, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui, pada Pilkada DKI 2017, pendukung Ahok juga merangkap kubu Jokowi, sedangkan pendukung Anies Baswedan merangkap kubu Prabowo. Yang paling umum dan sering muncul di media sosial akhir-akhir ini untuk ”merepresentasikan” kedua kubu adalah *kecebong* untuk pihak pro-Jokowi serta *kampret* buat kubu Prabowo. Sebutan kecebong bermula dari hobi Jokowi memelihara kodok, sehingga pengikutnya disebut kecebong. Sedangkan kampret adalah kelelawar kecil atau bisa disebut anak kelelawar.

Suryanto mengatakan bahwa politik sejatinya untuk kemuliaan dan menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kelayakan dalam bernegara jika ditinjau dari sisi pendidikan politik. Sayangnya pada pilpres 2019 ini, publik lebih diperlihatkan pada perseteruan antar kubu pilihan masing-masing. Suryanto pun menyebutkan sejumlah istilah yang mengemuka pada masa kampanye Pemilu 2019, seperti ”politikus sontoloyo”, ”gendruwo”, ”wajah Boyolali”, ”Indonesia akan bubar”, dan ”Indonesia akan punah”. Istilah-istilah itu diciptakan para politikus untuk mencari simpati dan menyerang pihak lawan demi kekuasaan. Politikus hendaknya tidak mengedepankan narasi kebencian dan saling menjatuhkan dari adanya perbedaan pendapat antarsesama anak bangsa, namun menjadikan perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Setiap orang memiliki cara pandang dan penilaian yang berbeda, yang seharusnya disikapi secara bijak guna menciptakan iklim kondusif yang selalu menjadi kebutuhan semua orang⁸.

Mencintai secara fanatis sama bahayanya dengan membenci yang membabi buta. Sebab, yang seperti ini biasanya ngawur dan emosional menjadi andalan utama. Dalam Islam, sifat fanatik terhadap partai politik tidak diperbolehkan sebagaimana dijelaskan Abu Yasid dalam bukunya Fikih Politik. Hal tersebut karena, sikap fanatik terhadap parpol seringkali memunculkan sikap arogansi berlebihan yang terkadang sampai merenggut korban jiwa⁹ terutama saat-saat kampanye berlangsung. Konvoi yang berlebihan dan arogansi dalam kampanye diantaranya.

Istilah Kecebong vs Kampret Dalam Pilpres 2019

Kecebong merupakan sebutan bagi anak katak, atau dalam KBBI kecebong diartikan dengan larva binatang amfibi berekor yang hidup di air dan bernapas dengan insang¹⁰. Kecebong biasa disebut juga dengan nama berudu. Sementara kampret merupakan sebutan untuk anak kelelawar. Dalam KBBI kampret diartikan sebagai kelelawar kecil pemakan serangga yang memiliki hidung berlipat-lipat atau disebut dengan istilah *Microchiroptera*.¹¹ Nama kedua hewan tersebut mendadak menjadi sangat populer pasca pemilihan umum presiden 2019 di Indonesia.

⁸ *bbc.com, Kamus Nyinyir Pilkada Jakarta yang Dipakai di Media Sosial, (12/4/2017)*

⁹ Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern (Fikih Politik)*, Erlangga: Jakarta, Buku 2: 2007, hlm: 4

¹⁰ <https://kbbi.web.id/kecebong>

¹¹ <https://kbbi.web.id/kampret>

Pasalnya, sebutan “Kecebong dan Kampret” digunakan untuk menyebut pendukung dari kedua pasangan calon kandidat presiden dan wakil presiden.

Sebutan 'kecebong' dan 'kampret' kerap kali diasosiasikan ke pendukung petahana dan oposisi selama proses pilpres 2019 berlangsung. Kedua sebutan tersebut mendadak populer di media sosial, sebagaimana diungkapkan Ismail Fahmi sebagai seorang analis media sosial, bahwa identitas 'kecebong' ternyata lebih populer ketimbang identitas 'kampret'. Sebutan kecebong disandangkan kepada para pendukung calon petahana, sementara sebutan kampret diperuntukkan bagi para pendukung calon dari oposisi. Ismail usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Panas di Medsos Dingin di Kotak Suara' di Jakarta, Rabu (14/11) juga menyatakan, bahwa frekuensi pemanggilan 'kecebong' jauh lebih besar dibanding si 'kecebong' memanggil kubu lawan dengan sebutan 'kampret'. Selain itu, Ismail dalam pemaparannya juga mengatakan, bahwa frekuensi pendukung Jokowi menyebut dirinya sendiri sebagai 'kecebong' juga lebih besar dibanding pendukung Prabowo menyebut dirinya sebagai 'kampret'. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebutan bagi warganet yang paling nyinyir adalah kampret, karena lebih sering memanggil sebutan 'cebong-cebong' secara guyonan frekuensi". Kendati demikian, sebutan identitas negatif tersebut dianggap lebih halus jika dibandingkan dengan penyebutan ideologi atau SARA tertentu.

Media sosial memberikan ruang yang begitu luas dalam proses sosialisasi politik yang demokratis, akan tetapi media sosial juga dapat menjadi alat yang perlu diberikan perhatian lebih dalam kedewasaan berdemokrasi. Hal tersebut terlihat dari kepopuleran istilah negatif “kecebong dan kampret” yang semakin massif tidak lain akibat peran media massa dalam membesarkannya. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Nuryaman, bahwa penggunaan dua istilah tersebut tidak lain karena adanya alat yang kemudian membuat propaganda “Kecebong dan Kampret” terus digunakan, yaitu media sosial¹². Sehingga, tidak bisa dipungkiri peran media sosial yang begitu signifikan dalam pertarungan politik pilpres 2019.

Pada dasarnya, media sosial menjadi sarana komunikasi politik yang sangat signifikan dalam proses komunikasi politik. Hal tersebut terlihat dari maraknya penggunaan media sosial oleh para pejabat dalam rangka mengkomunikasikan agenda politik mereka. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa media sosial memiliki 2 sisi yang berbeda, sisi positif sekaligus sisi negatif dalam komunikasi politik. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Faridhian, bahwa dengan media sosial para pemangku kebijakan dapat berbincang akrab dengan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain media sosial juga dapat menjadi alat untuk menjatuhkan mereka di mata

¹² Nuryaman Berry Hariyanto, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kebangsaan 1998 (LASTIKA'98), *Medsos Memungkinkan Kampret dan Kecebong Digunakan Terus, dalam* <https://www.watutink.com/opini/Medsos-Memungkinkan-Kampret-dan-Kecebong-Digunakan-Terus>

masyarakat akibat bahkan menjadi bahan olok-olokan dan candaan¹³. Adanya istilah Kecebong dan Kampret menjadi salah satu contoh konkrit hal tersebut.

Setiap tim kesebelasan peserta Piala Dunia punya julukan masing-masing. Denmark disebut Tim Dinamit, tim Inggris dijuluki Three Lions (tiga singa), Prancis dipanggil Les Blues (si biru), Jerman dapat sebutan Tim Panser. Julukan atau nama lain tak hanya berlaku di sepakbola, namun jagat politik juga punya. Namun dalam pemilihan umum presiden 2019, pendukung Joko Widodo disebut kecebong dan pendukung Prabowo Subianto dipanggil kampret. Keduanya tidak menjadi sebutan yang menyenangkan bagi kedua kubu, tetapi sebagai slogan negative yang tidak disukai masing-masing kubu.

Sebutan kecebong dan kampret punya muasal masing-masing. Kecebong bermula dari perilaku Presiden Jokowi yang memelihara kodok di istana. Kecebong atau berudu adalah bayi-bayi kodok sebelum menjadi dewasa. Sedang awal mula sebutan kampret, lebih dikorelasikan dengan peristiwa pencalonan Prabowo sebelumnya. Sewaktu Prabowo kalah di Pilpres 2014, oposisi pemerintahan Jokowi menamakan diri Koalisi Merah Putih atau disingkat KMP. Singkatan itu dibaca "ka-em-pe" yang diplesetkan menjadi kampret atau anak kelelawar. Tentu saja, sebutan kecebong bagi pendukung Jokowi datang dari pendukung Prabowo. Begitu juga sebaliknya. Kubu pro Jokowi yang memanggil pendukung Prabowo kampret. Artinya, dua julukan itu bersifat ejekan.

Baiquni menjelaskan cebong sebagai bakal anaknya katak/kodok. Dalam istilah manajemen kodok, bahwa sifat kodok dewasa senantiasa kaki dua menginjak ke bawah, tangan dua mengangkat ke atas. Sementara anak kodok atau kecebong, memiliki karakter selalu berkelompok, mengikuti ke mana katak dewasa pergi. Berdasarkan hal tersebut, Baiquni berpendapat tentang adanya partai induk dan ada sub-sub partai yang mengikuti. Kalau kampret sama halnya dengan kelelawar, yang dianggap makannya buah dan memiliki watak serakah. Tapi sebutan kampret di sini adalah istilah yang dipakai sebagai alat propaganda. Hal serupa sudah pernah dilakukan jauh sebelumnya. Seperti misalnya kasus "Apel Malang dan Apel Washington". Sebelumnya lagi Gus Dur pernah menggunakan sebutan "kolor ijo" dan "bambu kuning". Kolor ijo kalau tidak salah merujuk pada militer, dan bambu kuning istilah untuk partai berbaju kuning kala itu. Militer bisa diredam dengan komunikasi dengan bambu kuning. Dimana sebutan-sebutan tersebut sebenarnya hanya media propaganda saja.¹⁴

Kegagalan Pendidikan Politik

Sistem demokrasi hendaknya diiringi dengan kedewasaan dalam berdemokrasi, diantaranya melalui pendidikan politik yang tepat untuk meningkatkan

¹³ Faridhian Anshari, "Komunikasi Politik Di Era Media Sosial", dalam Jurnal Komunikasi, Volume 8 Nomor 1, Oktober 2013, hlm. 92-93

¹⁴ <https://www.watyutink.com/opini/Kampret-dan-Kecebong-Propaganda-dalam-Komunikasi-Politik>

kesadaran politik. Tanpa pendidikan politik yang memadai, system demokrasi menjadi rentan dan mengalami kepincangan karena munculnya sikap-sikap apolitis masyarakat yang kurang menyadari pentingnya demokrasi politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada dasarnya, demokrasi hendaknya di support dengan kehadiran masyarakat madani yang mampu menolak kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat melalui cara-cara damai dan bijak.¹⁵ Sementara masyarakat madani yang mandiri, kritis, dan edukatif hanya dapat terwujud dengan adanya pendidikan politik yang bermoral dan berkarakter.

Pendidikan politik sebagaimana dijelaskan oleh Istikharah dan Asrinaldi, bahwa fungsi pendidikan politik antara lain adalah untuk: a) Memahami kembali tentang politik dan pentingnya kesadaran dalam berpolitik, b) Mendidik atau mengontrol emosi dalam berpolitik, dimana warga negara dapat memaklumi hubungan sosial yang sifatnya heterogen antara satu dengan lainnya, dan c) Meningkatkan kesadaran dalam berpolitik, yang berkaitan dengan keterampilan implementasi politik dan pendidikan global.¹⁶

Menurut Edwin Nurdiansyah, salah satu dosen di Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa pendidikan politik dapat berdampak pada pelaksanaan demokrasi, dimana pendidikan politik yang tidak dapat berjalan dengan baik berdampak pada ketidak efektifan pelaksanaan demokrasi yang berpotensi memunculkan konflik sektoral.¹⁷ Hal tersebut karena masyarakat pendukung tidak memiliki kedewasaan dalam menyikapi proses demokrasi akibat kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik. Oleh sebab itu, pemerintah berperan penting dalam proses sosialisasi serta implementasi pendidikan politik, termasuk partai politik sebagai aktor utama dalam proses demokrasi. Edwin juga menyebutkan bahwa warga negara yang memahami hak dan kewajiban dalam berpolitik senantiasa akan mendukung proses demokrasi, sebaliknya warga negara yang tidak memahami politik dapat menjadi bibit konflik dalam persatuan bangsa.

Pendidikan politik diartikan sebagai upaya penyampaian budaya politik bangsa yang dilakukan secara sadar, dengan senantiasa memerhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Partai politik sebagai instrumen pokok sebuah demokrasi berdasarkan sistem keterwakilan dalam prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, partai politik memiliki peran utama dalam sosialisasi sekaligus pendidikan politik. Salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk berperan aktif dan kreatif serta sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.¹⁸

¹⁵ Ismatullah, Deddy & Asep A. Sahid Gatara Fh, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama, CV. Pustaka Setia: Bandung, Cet. II: Februari, 2007, hlm: 129

¹⁶ Istikharah & Asrinaldi, "Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad-Hoc", dalam NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 6 (2) (2019), hlm. 320

¹⁷ Edwin Nurdiansyah, "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia", dalam Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2 Nomor 1, Mei 2015, hlm: 54.

¹⁸ Pasaribu, Payerli, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik (JPPUMA), 5 (1) (2017), hlm: 53-57

Baik mereka yang disebut kecebong maupun kampret sama-sama militan membela junjungan masing-masing. Mengkritik Jokowi, harus siap diserbu pasukan kecebong begitupun sebaliknya. Kedua pendukung terkesan irrasional dalam membela kandidatnya. Pendukung Jokowi mengaku berpandangan moderat atau bahkan liberal. Sedangkan pendukung Prabowo mengaku kaum konservatif bahkan bersikap fundamentalis. Perang wacana tak berlaku, kedua kubu pendukung saling ejek dan cenderung destruktif. Sehingga beberapa berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kegagalan pendidikan politik di masyarakat. Wacana-wacana yang dilemparkan di media social cenderung tidak sehat, karena seharusnya dalam pesta demokrasi adu gagasan yang dijadikan senjata utama. Berperang opini dengan cara-cara yang terdidik dan mencerahkan, dan bukan perang urat syaraf yang bernilai saling menjatuhkan dan saling melemahkan antar anak bangsa.

Dampak Perseteruan Dua Kubu

Seperti diketahui, kubu pendukung Joko Widodo (Jokowi) dikenal dengan julukan 'kecebong', sementara kubu penyokong Prabowo Subianto dilabeli 'kampret'. Labelisasi ini telah ada pasca kemenangan Jokowi di Pilpres 2014, dan semakin terpolarisasi dan berlanjut hingga 2019. Peneliti Saeful Mujani Research & Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyebut bahwa penggunaan istilah 'kecebong' dan 'kampret' berpeluang memecah belah bangsa. Menurutnya, bila hal itu terjadi kemungkinan besar akan sulit mengembalikan integrasi bangsa. Labelisasi dengan nama hewan juga pernah digunakan di negara Rwanda saat peperangan berlangsung, dimana musuh menganalogikan lawannya dengan sebutan kecoa. Oleh sebab itu, Saidiman khawatir jika penggunaan slogan negatif dalam kontestasi pemilihan umum presiden 2019 termasuk kategori berbahaya bagi integrasi bangsa, mengingat perlu waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan pembelahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kasus Ahok misalnya, masyarakat yang seharusnya menginginkan kehidupan harmonis menjadi terpecah menjadi dua kubu. (Jakarta, Jum'at, 12/10).

Berbeda dengan Baiquni, yang menyatakan bahwa adanya propaganda 'Kecebong vs Kampret' merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dikhawatirkan, karena bukan merupakan substansi dari permasalahan. Kecebong vs Kampret menurutnya hanya sebagai simbolik melalui bahasa. Dimana bahasa hanya akan menjadi kekuatan jika dipegang oleh orang yang memiliki kekuatan.¹⁹ Sementara Ismail dalam diskusi bertajuk 'Panas di Medsos Dingin di Kotak Suara' di Jakarta, Rabu (14/11) menilai, bahwa di satu sisi penyebutan 'kecebong' dan 'kampret' dapat bermanfaat untuk mengurangi ketegangan antarpending.

Istilah "kecebong" dan "kampret" menjadi wajah buruk polarisasi politik Indonesia yang selama ini sudah menggurita di ranah akar rumput. Jurang pemisah tersebut bermula sejak Pemilihan Umum Presiden 2014. Dosen Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang, Suryanto, mengatakan bahwa

¹⁹ <https://www.watutink.com/opini/Kampret-dan-Kecebong-Propaganda-dalam-Komunikasi-Politik>

masyarakat terbelah menjadi dua kubu sejak empat tahun lalu. Sampai sekarang, jurang pemisah antarkubu masih berlanjut dan makin dalam. Polarisasi tersebut bahkan sampai menelan korban karena saling membunuh hanya karena perbedaan pilihan politik (Semarang, Kamis 27/12). Suryanto menyayangkan konten kampanye Pilpres 2019 yang tidak sehat terjadi juga di media arus utama. Para kandidat dan para elite pendukung saling serang, fitnah, dan mencari kelemahan satu sama lain. Menurutnya, kampanye seharusnya tidak digunakan untuk saling mencela, menjelekan, mencemooh, dan menjatuhkan sehingga lupa bahwa mereka pada dasarnya satu, yaitu bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, di berbagai media televisi menyajikan debat public para kandidat yang cenderung membosankan dan memuakkan karena nirsustansi politik di ruang. Masyarakat dihadapkan dengan realitas publik yang membicarakan ketidakpastian politik. Sementara dalam hal esensi, justru hanya memperdebatkan persoalan fisik, fitnah, kebohongan (*hoaks*), kebencian, caci maki, dan adu domba.

Penggunaan istilah-istilah yang tidak mendidik hendaknya dihindari. Ajaran Islam melarang umatnya menjuluki atau memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang tercela, seperti misalnya menamai orang dengan jenis-jenis hewan yang berkonotasi negatif, termasuk sebutan kampret dan kecebong. Islam secara tegas melarang memanggil dan memberi gelar buruk serta mengolok-olok orang lain, karena hal tersebut sama halnya menghinakan dan merendahkan orang lain. Terkadang orang yang dihina bisa jadi lebih terhormat di sisi Allah dan bahkan lebih dicintai-Nya daripada orang yang menghina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olok) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok). Jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk..."* (QS Al-Hujurat: 11).

Dalam riwayat yang disebutkan Ad-Dahhak menyebutkan, bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah, tiada seorang pun dari kami (Bani Salamah) melainkan mempunyai dua atau tiga nama. Tersebutlah pula, apabila beliau memanggil seseorang di antara mereka dengan salah satu namanya, mereka mengatakan: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak menyukai nama panggilan itu."* Maka, turunlah firman Allah tersebut. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mencela satu sama lain dan terlebih menyematkan gelar-gelar atau label-label yang buruk. Ayat di atas sepatutnya digunakan sebagai otokritik dalam melihat diri sendiri jika diberi sebutan-sebutan buruk tersebut, mayoritas pastinya menolak. Contoh sederhana seperti panggilan "mbrot", "mbul", "truk gandeng", dan lainnya bagi orang gemuk. Atau orang kurus yang dipanggil "cungkring", "krempeang", "biting", "gepeng", dan lain-lain. Sederhana tapi cukup menyakitkan, begitupun dengan sebutan *kecebong* dan *kampret* antar lawan politik.²⁰

²⁰ <https://geotimes.co.id/opini/kecebong-dan-kampret-label-label-buruk-dalam-pemilu/>

Dalam sosialisasi politik, komunikasi politik juga perlu diperhatikan terutama komunikasi massa. Komunikasi massa berfungsi sebagai pengamatan terhadap lingkungan, korelasi masyarakat terhadap lingkungan dan proses transmisi warisan sosial sebagaimana dinyatakan Harold D. Laswell sebagai pakar komunikasi.²¹ Banyak sekali wacana yang dilemparkan di *Facebook* terlepas hal tersebut hoax atau tidak dari kedua pendukung, saling serang dengan kata-kata nyinyir itu dimulai semenjak Pilpres 2014 yang berlanjut pada Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019. Peran media sosial dalam hal ini cukup besar, yaitu peran memunculkan jargon-jargon politik yang negatif.

Ideologi Pancasila Sebagai Landasan Pendidikan Politik Bangsa Indonesia

Penyebutan 'Kecebong dan Kampret' merupakan alat komunikasi propaganda masing-masing kubu yang bernilai negatif. Hal tersebut tidak lain karena terkesan saling cela dan rentan dalam menciptakan jarak besar antar kedua kubu. Dalam khazanah ideologi bangsa Indonesia, penyebutan binatang seringkali berkonotasi negative.²² Maka, sebutan Kecebong dan Kampret merupakan bahasa komunikasi propaganda yang tidak sesuai etika berpolitik berdasarkan Pancasila. Istilah Kecebong dan Kampret dalam pilpres 2019 telah menggeser perang wacana antar calon pemimpin dari wacana ideologis yang seharusnya karena bersifat saling menjatuhkan dan serangan membabibuta tanpa disertai data dan fakta. Sehingga hal tersebut tidak memiliki nilai pendidikan politik yang seharusnya memberi pencerahan kepada masyarakat.

Dalam Islam dikenal istilah syura (musyawarah), dimana wajib hukumnya untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah.²³ Setiap persoalan apapun hendaknya diselesaikan melalui musyawarah untuk dapat saling bertukar ide dan gagasan dalam mencapai kebijakan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah mengalami pasang surut penerapan demokrasi dalam sejarah Indonesia. Dimulai dengan diterapkannya demokrasi liberal yang dirasa kurang pas dengan nilai-nilai bangsa, berganti dengan demokrasi terpimpin di era Soekarno, dan kemudian diganti dengan demokrasi Pancasila masa Soeharto. Penerapan demokrasi Pancasila dibagi menjadi dua periode: yakni periode orde baru dan periode reformasi. Setiap individu berhak menyampaikan aspirasi, berkumpul dan berserikat dalam negara demokrasi, dengan tetap diberlakukan pedoman dasar²⁴ yaitu nilai-nilai Pancasila. Disinilah peran pentingnya pendidikan

²¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, hlm. 27

²² Nuryaman, Berry Hariyanto, *Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kebangsaan 1998 (LASTIKA'98)*,

Medsos Memungkinkan Kampret dan Kecebong Digunakan Terus, dalam <https://www.watutink.com/opini/Medsos-Memungkinkan-Kampret-dan-Kecebong-Digunakan-Terus>

²³ Abu Yasid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern (Fikih Politik)*, Erlangga: Jakarta, Buku 2: 2007, hlm. 80.

²⁴ H. Nihaya M, *"Demokrasi dan Problematikanya Di Indonesia"*, dalam jurnal Sulesana, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2011, hlm. 21-22.

politik di masyarakat, supaya tercipta iklim komunikasi politik yang baik dan aktif, yakni yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan masyarakat bertujuan untuk menghasilkan output yang baik. Dinamika evolusi demokrasi tersebut tidak lain karena bangsa Indonesia ingin menyesuaikan antara karakter bangsa dengan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sayangnya, demokrasi dianggap masih menjadi isu seputar kaum elit saja, sementara kaum menengah ke bawah masih disibukkan dengan isu ekonomi. Fenomena munculnya jargon-jargon negatif dalam pilpres 2019, tidak mencerminkan adanya implementasi etika politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat mengancam persatuan bangsa dan negara. Dalam hal ini, hendaknya para komunikator dan aktifis politik mampu menyampaikan pesan politik secara santun dan bermartabat, antara lain dengan menyentuh langsung kepada kebutuhan dasar masyarakat dan bukan fokus memperjuangkan kepentingan kelompok dengan cara saling menjatuhkan.²⁵

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait adanya slogan negatif Kecebong versus Kampret, diantaranya:

Pertama; perilaku saling ejek dengan memanggil masing-masing kubu lawan dengan sebutan kecebong atau kampret merupakan sikap yang tidak baik dan dapat menimbulkan perpecahan antar bangsa. Sehingga dampaknya masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu, kubu kecebong atau kubu kampret.

Kedua; penggunaan slogan negatif dengan menggunakan nama hewan atau binatang untuk menyebut kubu lawan merupakan sikap kekanak-kanakan yang seharusnya dihindari oleh seluruh komponen lapisan warga masyarakat. Namun, bila kemudian ingin menyebut suatu kelompok, maka sebutlah dengan nama-nama baik dan mulia.

Ketiga; penyebutan dengan slogan negatif dalam aturan agama apapun dilarang, termasuk dalam aturan agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Menyebut orang lain dengan sebutan yang buruk tidak menyebabkan si pelaku menjadi baik dan yang disebut menjadi buruk. Karena boleh jadi yang disebut buruk akan lebih baik daripada orang yang menyebut buruk.

REFERENSI

- Anshari, Faridhian, "*Komunikasi Politik Di Era Media Sosial*", dalam Jurnal Komunikasi, Volume 8 Nomor 1, Oktober 2013.
- Berry Hariyanto, Nuryaman, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kebangsaan 1998 (LASTIKA'98),

²⁵ Eko Harry Susanto, "*Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum*", dalam Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 171

- Medsos Memungkinkan Kampret dan Kecebong Digunakan Terus, dalam*
<https://www.watyutink.com/opini/Medsos-Memungkinkan-Kampret-dan-Kecebong-Digunakan-Terus>
- Ismatullah, Deddy & Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, CV. Pustaka Setia: Bandung, Cet. II: Februari, 2007.
- Istikharah & Asrinaldi, "*Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad-Hoc*", dalam *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6 (2) (2019).
- Kaelan, "*Pendidikan Pancasila: Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air*", Paradigma: Yogyakarta, Edisi Reformasi: 2016.
- M, H. Nihaya, "*Demokrasi dan Problematikanya Di Indonesia*", dalam jurnal *Sulesana*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2011.
- Nugroho, Heru, "*Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*", dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No.1, 2012.
- Nurdiansyah, Edwin, "*Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia*", dalam *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2015.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pasaribu, Payerli, "*Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik (JPPUMA)*, 5 (1) (2017).
- Patra, Abd Kadir, "*Masalah dan Prospek Demokrasi*", dalam *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 1 2009.
- Sanit, Arbi, "*Gagasan Pematangan Sistem Demokrasi Dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Kelembagaan dan Kepemimpinan*", dalam *Jurnal Politik* Vol. 1 No. 1, Agustus 2015.
- Susanto, Eko Harry "*Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum*", dalam *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2013.
- Yasid, Abu, *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern (Fikih Politik)*, Erlangga: Jakarta, Buku 2: 2007.
- bbc.com, Kamus Nyinyir Pilkada Jakarta yang Dipakai di Media Sosial*, (12/4/2017)
<https://kbbi.web.id/kecebong>
<https://kbbi.web.id/kampret>
<https://www.watyutink.com/opini/Kampret-dan-Kecebong-Propaganda-dalam-Komunikasi-Politik>
<https://www.watyutink.com/opini/Kampret-dan-Kecebong-Propaganda-dalam-Komunikasi-Politik>
<https://geotimes.co.id/opini/kecebong-dan-kampret-label-label-buruk-dalam-pemilu/>